



MESKI BOS CUKUPI KEBUTUHAN OPERASIONAL
Sekolah Berharap Birokrasi Tak Berbelit-belit

YOGYA (KR)- Keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dianggap sudah mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Dana BOS harus digunakan secara hati-hati sesuai ketentuannya. Pihak sekolah berharap, dengan pemerintahan kali ini birokrasi yang diterapkan bisa lebih sederhana.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 6 Yogya Titik Sugiyarti mengatakan, dana BOS ada dua yakni BOS pusat dan BOSDA. Untuk SMP di Kota Yogya, satu anak pertahun mendapat Rp 1 juta. Sedangkan dana BOSDA mendapat Rp 1.750.000 peranak. Ditambah siswa yang mempunyai Kartu Menuju Sehatra (KMS) mendapat jaminan pendidikan daerah sebesar Rp 500.000 per semester. Dana ini digunakan untuk keperluan yang terkait dengan sekolah seperti beli tas, seragam, buku dan sepatu. "Dengan jumlah ini sebenarnya operasional biasa sudah cukup. Karena untuk pembiayaan bangunan konstruksi berat dikover dana Pemkot. Dan konstruksi ringan bisa memakai

dana BOS dan BOSDA," ungkap Titik kepada KR, Selasa (22/10). Titik mengungkapkan, penggunaan dana BOS sudah diatur untuk belanja modal, pegawai serta belanja barang dan jasa. "Kami tidak bisa seandainya belanja karena ada aturan. Dana BOSDA juga sudah ada prosentase yang harus dibelanjakan. Pihak sekolah juga tidak bisa menarik uang dari wali murid," imbuh Titik.

Titik mengungkapkan, sebagai pelaksana, pihak sekolah hanya menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan adanya Undang-undang yang ada. "Kalau dana BOSnya ditambah ya Alhamdulillah. Tapi aturannya kami harap lebih mudah dan simpel serta birokrasi tidak berbelit-belit," tegas Titik.

Komentar senada diungkapkan oleh Kepala SMK Maarif Yogyakarta, Drs Suharyanto. Menurutnya, meski keberadaan dana BOS bisa mengcover kebutuhan operasional layanan pendidikan, tapi sekolah harus tetap membuat skala prioritas. Terlebih bagi SMK dimana siswa banyak melakukan kegiatan praktikum, sehingga berdampak pada kebutuhan operasional. Oleh karena itu, supaya sekolah bisa memberikan layanan secara maksimal. Pihaknya berharap agar di pemerintahan mendatang alokasi dana BOS dari pemerintah pusat bisa ditingkatkan berdasarkan kompetensi sekolah.

"Bagi sekolah swasta seperti kami keberadaan dana BOS ini sangat berarti, khususnya untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa. Oleh karena itu, kami berharap alokasi dana BOS bisa ditingkatkan," ujarnya.

Terpisah Kepala SMAN 6 Yogyakarta Drs Munjid Nur Alamsyah MA berpendapat kalau melulu dari dana Bos belum mencukupi, harapannya ke pemerintah ada peningkatan jumlah dana bos, serta alokasi penggunaan lebih dilonggarkan, misal untuk rehap sedang penggantian atap, usuk, blandar yang sudah diatas 20 tahun yang belum bisa terkover dana DAK. Serta untuk mendanai pendampingan kegiatan siswa yang dilaksanakan di luar jam kerja.

Sementara Kepala SMPN 15 Yogyakarta Siti Arina Budiastuti MPd BI mengungkapkan, sebaiknya perlu dikaji lagi unit cost persiswa biaya terutama kegiatan ekstra kurikuler belum dapat sepenuhnya terkover. Antara sekolah yang satu dengan lainnya memang berbeda. Terutama bagi sekolah yang jumlah siswanya sedikit perlu ada kebijakan khusus agar sekolah-sekolah dipinggiran, di desa, di pedalaman dapat melaksanakan KBM dengan baik.

(R-2/Ria/War)-c

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

.....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005